

2. CATATAN KONSULTASI PUBLIK UNTUK JALAN F/S

Jenis dan dokumen yang dibahas dalam Konsultasi Publik

Konsultasi Publik	Jenis Pertemuan	Dokumen yang dibahas	Peraturan atau Pedoman
1	Pertemuan umum	Konsep Kerangka Acuan AMDAL	Peraturan AMDAL Indonesia, Pedoman JICA
2	Rapat Komisi/ Tim Teknis Penilai AMDAL	Kerangka Acuan AMDAL	Peraturan AMDAL Indonesia
3	Pertemuan Stakeholder	Laporan Antara Proyek	Pedoman JICA
4	Rapat Komisi/ Tim Teknis Penilai AMDAL	Konsep Laporan Final ANDAL, RKL dan RPL	Peraturan AMDAL Indonesia, Pedoman JICA

Pelaksanaan Konsultasi Publik

Konsultasi Publik	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Jenis Peserta	Lokasi Pertemuan
Jalan Trans Sulawesi Mamminasata				
1	2-9 April 2007	59+59+51+36+44=249 orang	Masyarakat, perwakilan desa terkait dan instansi terkait	Kantor Camat Barombong, Polut, Biringkanaya, Rappocini, Mandai
2	8 Mei 2007	51 orang	Tim teknis dan anggota komisi	Kantor Bapedalda
3	7 Juni 2007	68 orang	Instansi terkait dan masyarakat	Hotel Imperial Arya Duta Makassar
4	20 Agustus 2007	51 orang	Tim teknis dan anggota komisi	Kantor Bapedalda
Jalan By-pass Mamminasa, Jl Hertasning, Jl. Abd. Daeng Sirua				
1	26 Mei - 7 Juni 2007	50+50+50+50+45=245 orang	Masyarakat, perwakilan desa terkait dan instansi terkait	Kantor Camat Galut, Pallangga, Pattallasang, Panakukang, Mandai
2	3 September 2007	45 orang	Tim teknis dan anggota komisi	Kantor Bapedalda
3	11 September 2007	112 orang	Instansi terkait dan masyarakat	Hotel Clarion Makassar
4	27 November 2007	51 orang	Tim teknis dan anggota komisi	Kantor Bapedalda

Pertemuan Konsultasi Publik (1a) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Senin, April 2, 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Barombong (Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel)	
Peserta:	59 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	6 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	3 orang
	Perwakilan masyarakat	45 orang (termasuk 3 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA)
		4 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Barombong 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan transparansi dalam proses pembebasan lahan. 2. Proyek ini diterima karena akan mengembangkan daerah di sekitarnya 3. Pengendalian kualitas pekerjaan konstruksi merupakan hal penting. Kami banyak melihat jalan yang rusak tepat setelah selesainya konstruksi, karena kontraktor tidak memenuhi standar konstruksi 4. Pertimbangan terhadap pihak2 yang akan kehilangan lahan mereka. 5. Dibutuhkan pertimbangan untuk saluran drainase dengan kapasitas yang besar. 		

Pertemuan Konsultasi Publik (1b) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Selasa, April 3, 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Polombangkeng Utara (Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel)	
Peserta:	59 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	7
	Pemerintah Kabupaten/kota	1 orang
	Perwakilan masyarakat	45 orang (termasuk 3 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA), 5 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Asisten Ekubang (II) Kabupaten Takalar 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk daerah yang dimana proyek akan dibangun, diperlukan membuat patok2 agar masyarakat tidak membuat bangunan baru di daerah tersebut. 2. Karena jalan yang ada tidak dapat menampung kebutuhan lalu lintas, proyek tersebut diterima oleh masyarakat 3. Diperlukan pertimbangan kompensasi bagi pihak-pihak yang terkena dampak 		

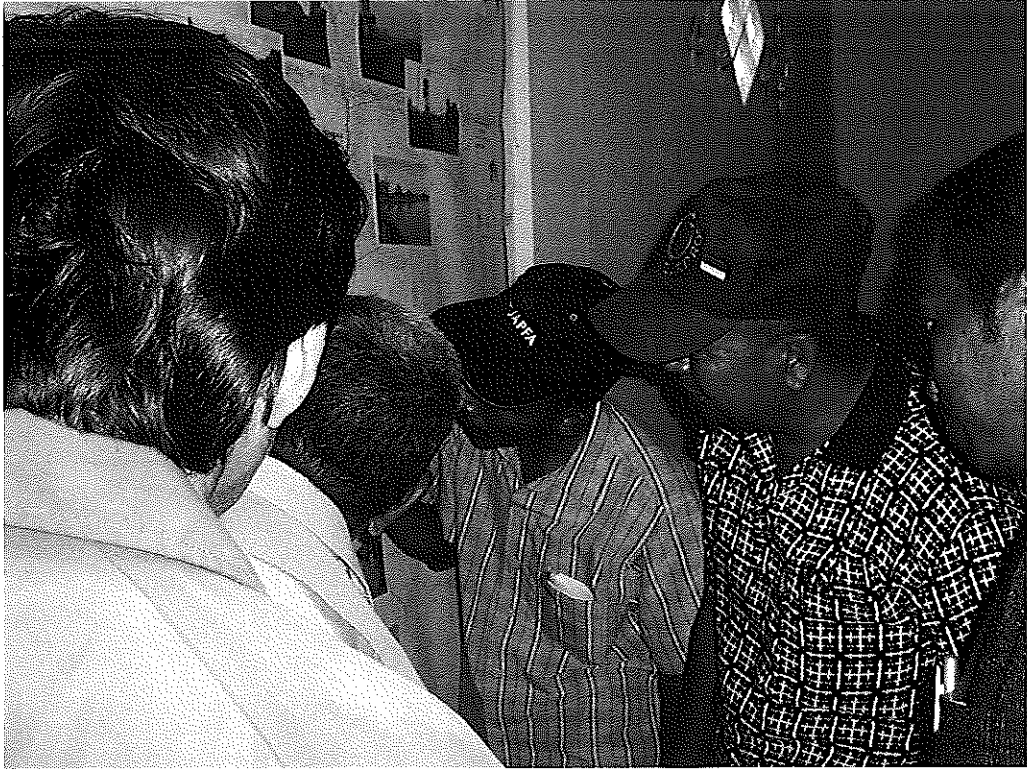
Pertemuan Konsultasi Publik (1c) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Rabu, April 4, 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Biringkanaya (Kota Makassar Provinsi Sulsel)	
Peserta:	51 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	3 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	2 orang
	Perwakilan masyarakat	42 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA) 3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Biringkanaya 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat 2. Diperlukan perhatian untuk fasilitas drainase, karena lokasi di depan Kopsau, Wisma Dirgantara dan Asrama Haji lama sering dilanda banjir selama dua setengah tahun terakhir, sementara kapasitas drainase di sepanjang Jalan Ir. Sutami tidak mencukupi 3. Tidak berfungsinya drainase dengan baik dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat 4. Diperlukan pendidikan mengenai hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pembebasan lahan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya permasalahan akibat proses pembebasan lahan. 5. Dibutuhkan perhatian terhadap pihak-pihak yang mungkin terkena dampak 6. Dibutuhkan jembatan penyeberangan agar pejalan kaki dapat menyeberangi jalan dengan mudah 		

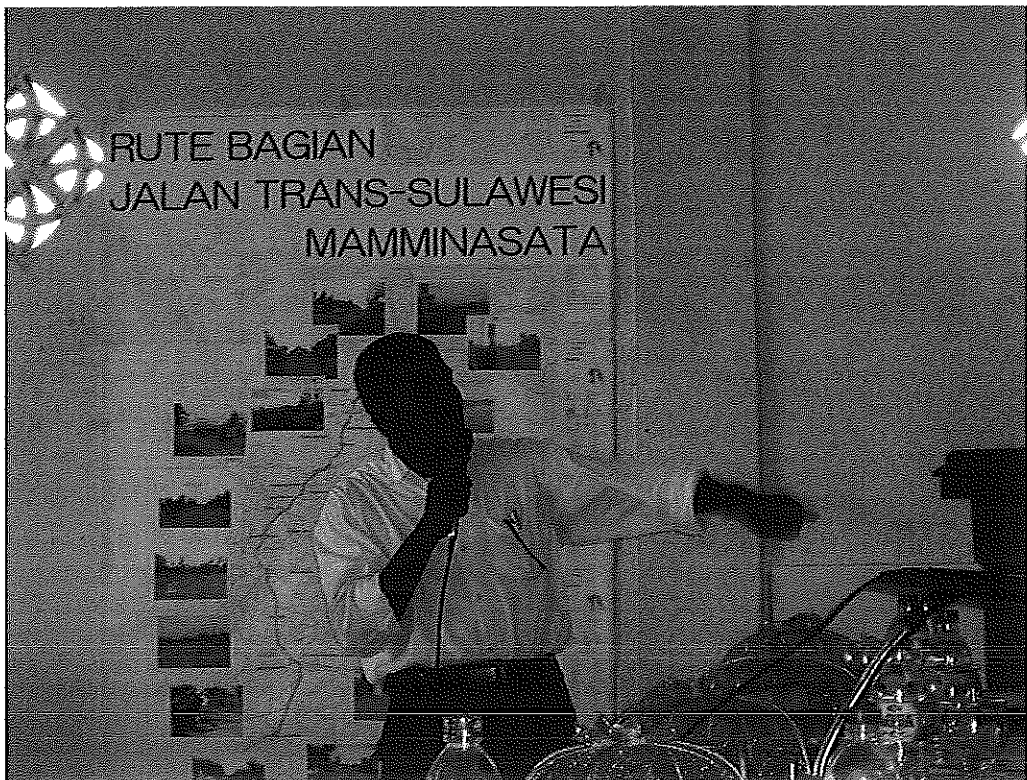
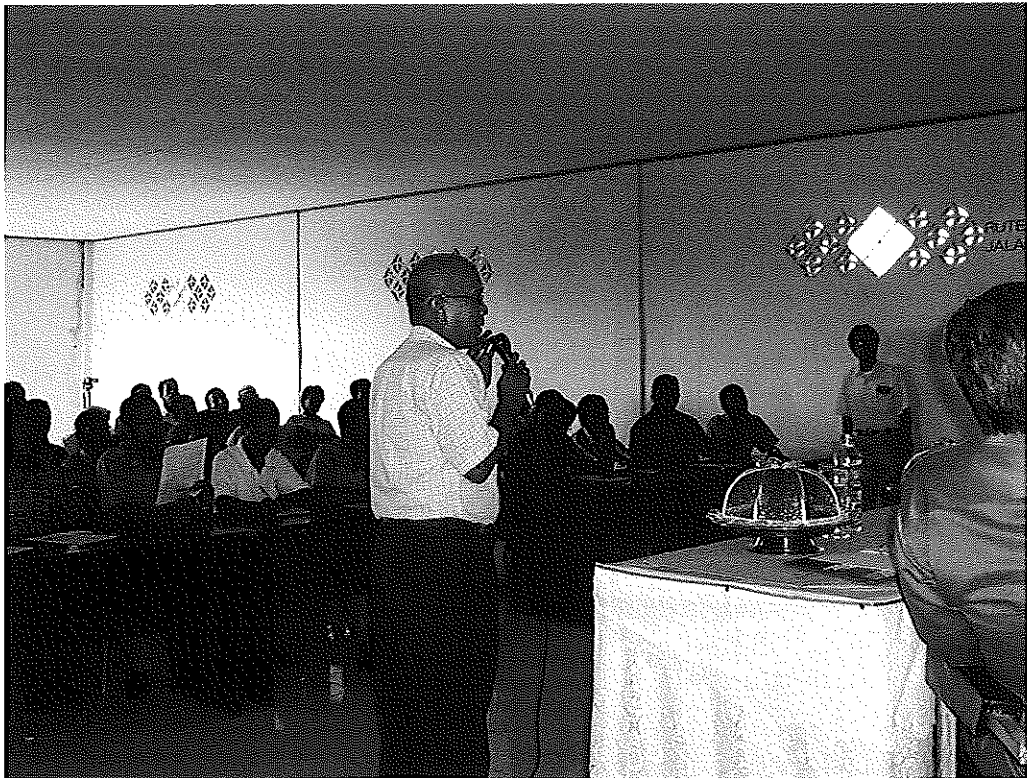
Pertemuan Konsultasi Publik (1d) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Kamis, April 5, 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Rappocini (Kota Makassar Provinsi Sulsel)	
Peserta:	36 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	5 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	2 orang
	Perwakilan masyarakat	25 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA) 3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Rappocini 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan ganti rugi yang adil dan tepat 2. Apakah ada sistem saluran drainase yang direncanakan untuk dibangun di daerah Panakukkang yang sering mengalami banjir? 3. Pertimbangan untuk fasilitas drainase yang tepat sangat diperlukan. Ada kekhawatiran banjir yang akan terjadi dengan adanya konstruksi jalan baru. 4. Apakah jalan Ir. Sutami akan menjadi jalan nasional? 5. Patok-patok yang menunjukkan daerah proyek diperlukan untuk menginformasikan kepada masyarakat agar tidak membangun di daerah tersebut. 		

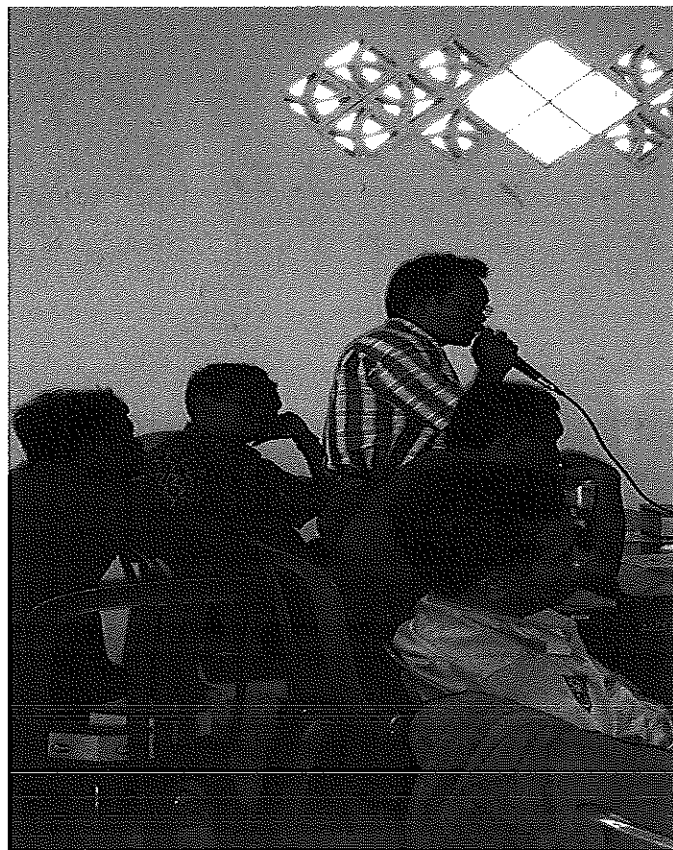
Pertemuan Konsultasi Publik (1e) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Senin, April 9, 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Mandai (Kabupaten Maros Provinsi Sulsel)	
Peserta:	44 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	5 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	3 orang
	Perwakilan masyarakat	32 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA) 3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Mandai	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek diterima dengan baik 2. Transparansi sangat dibutuhkan, khususnya dalam proses pembebasan lahan. Karena masyarakat telah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, dana kompensasi yang dibayarkan jauh lebih rendah dari yang diumumkan. 3. Keterbukaan inuntukmasi mengenai proyek harus dilakukan dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. 4. Patok-patok yang menunjukkan daerah proyek diperlukan untuk menginuntukmasikan kepada masyarakat agar tidak membangun di daerah tersebut 5. Saluran drainase diperlukan untuk menjaga sawah dari banjir. 		

Pertemuan Konsultasi Publik Barombong



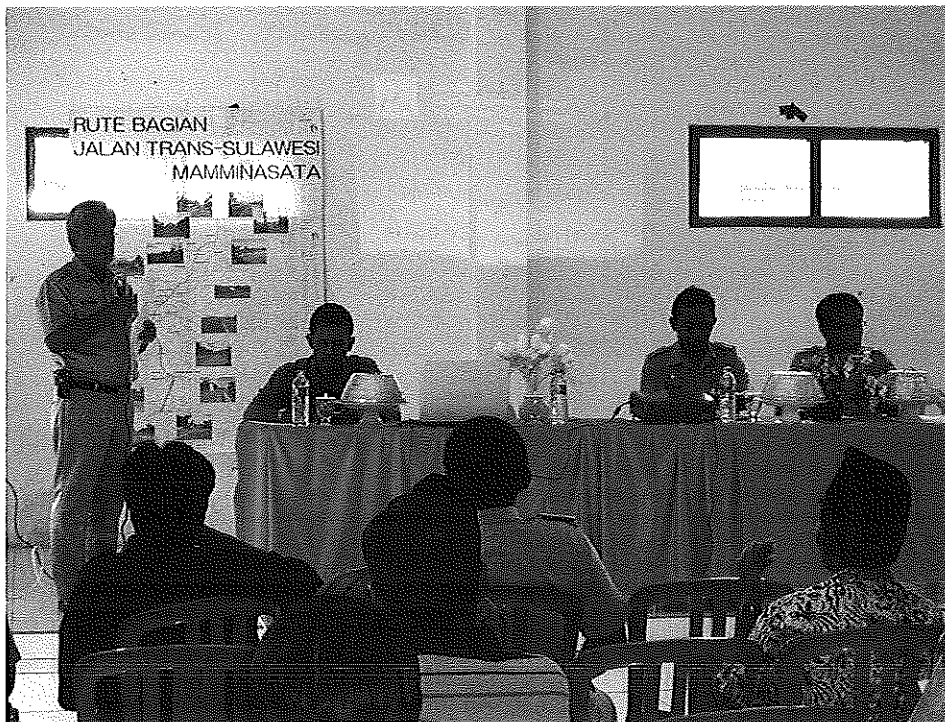




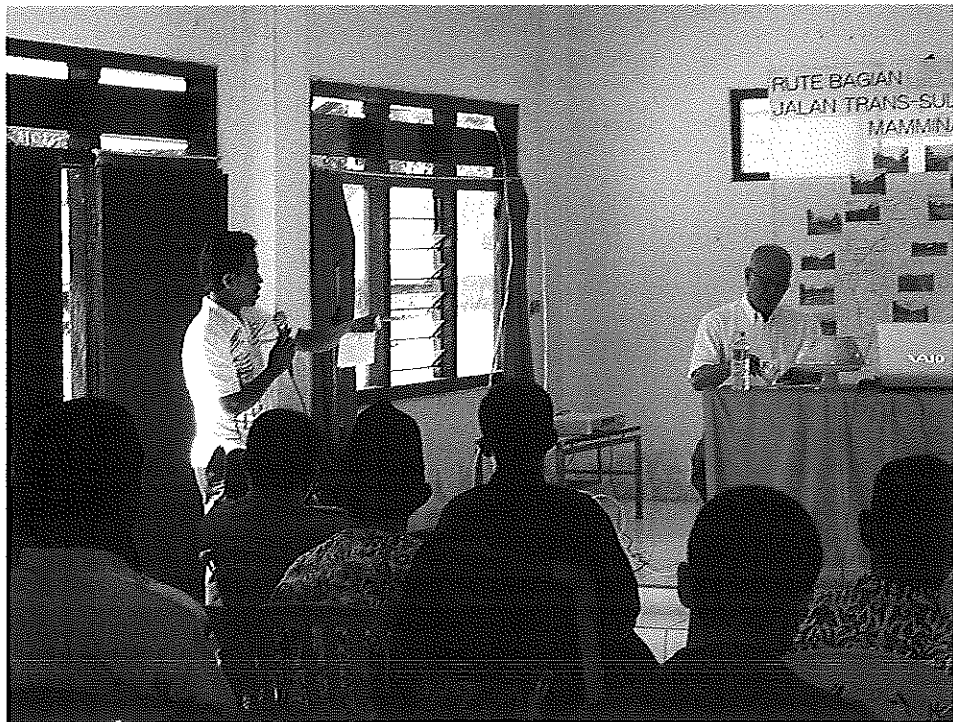
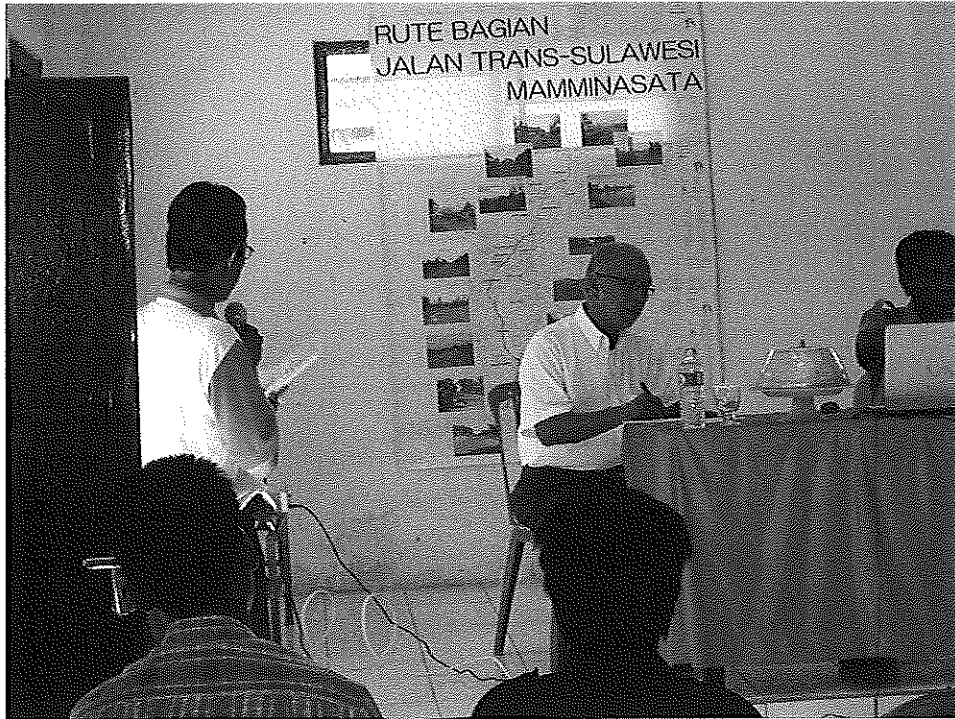




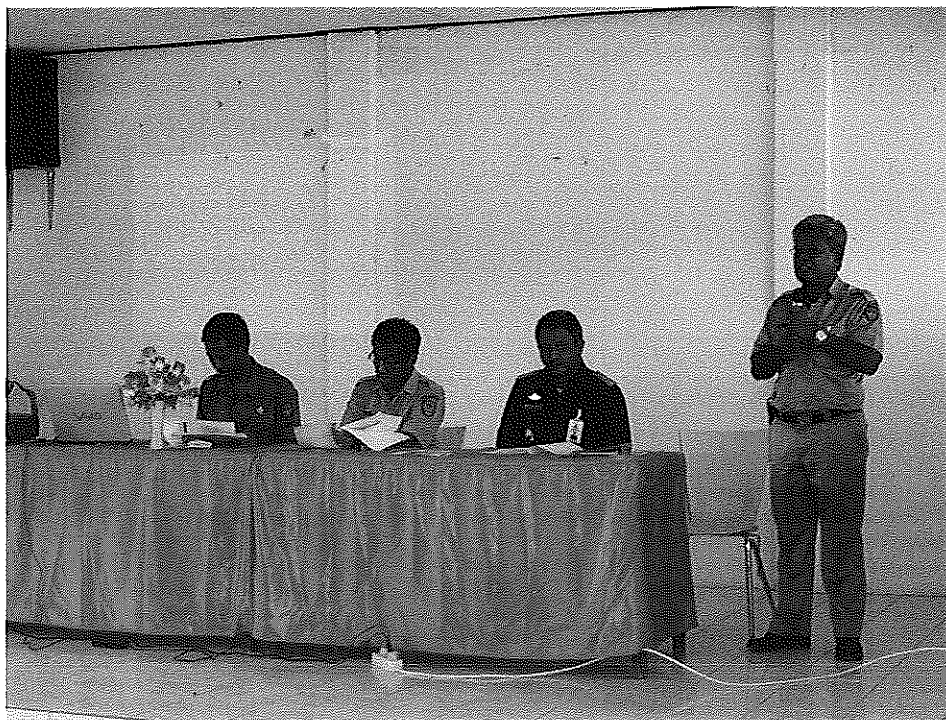
Pertemuan Konsultasi Publik di Polongbangkeng Utara

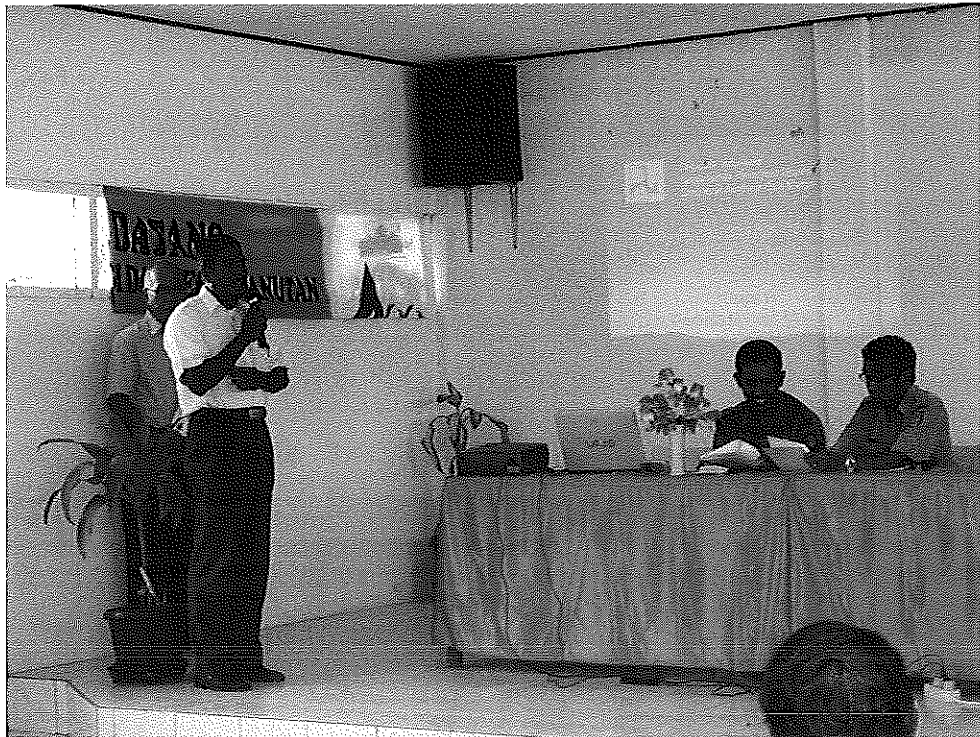


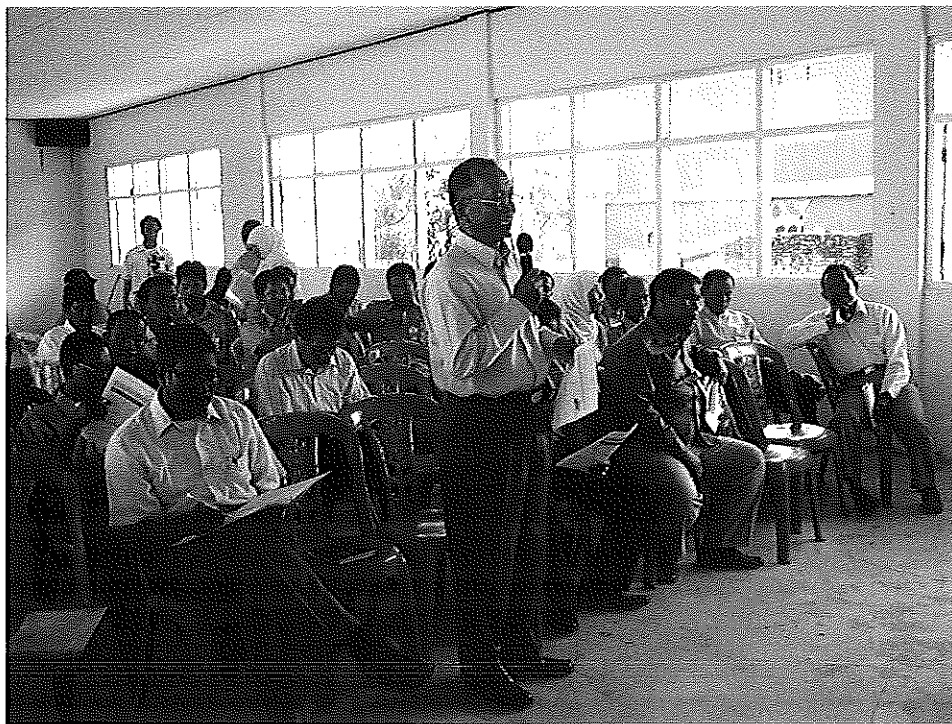
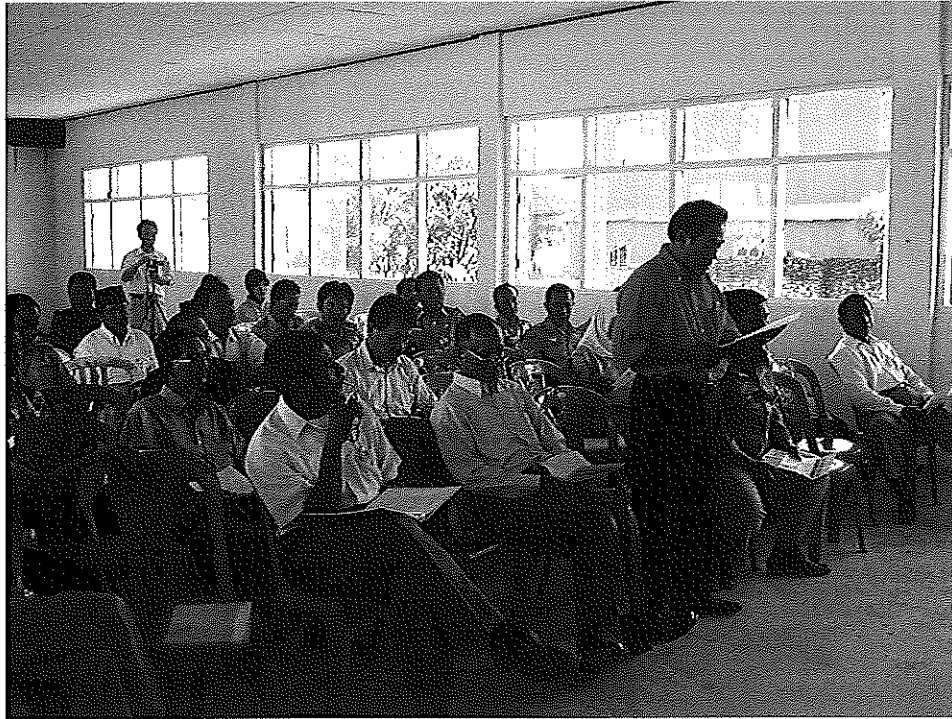


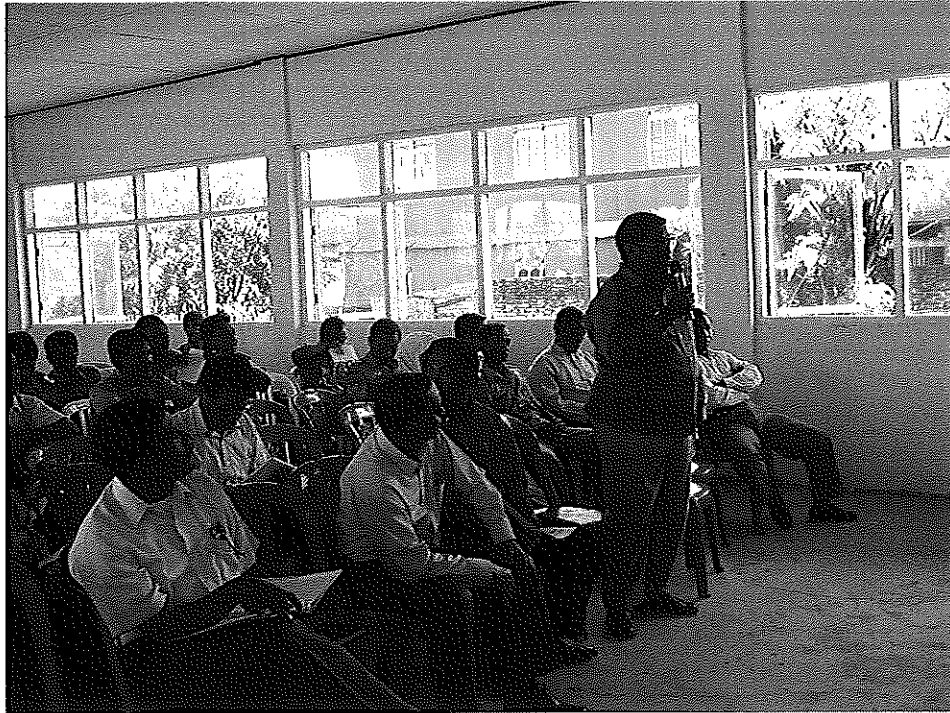


Pertemuan Konsultasi Publik Biringkanaya



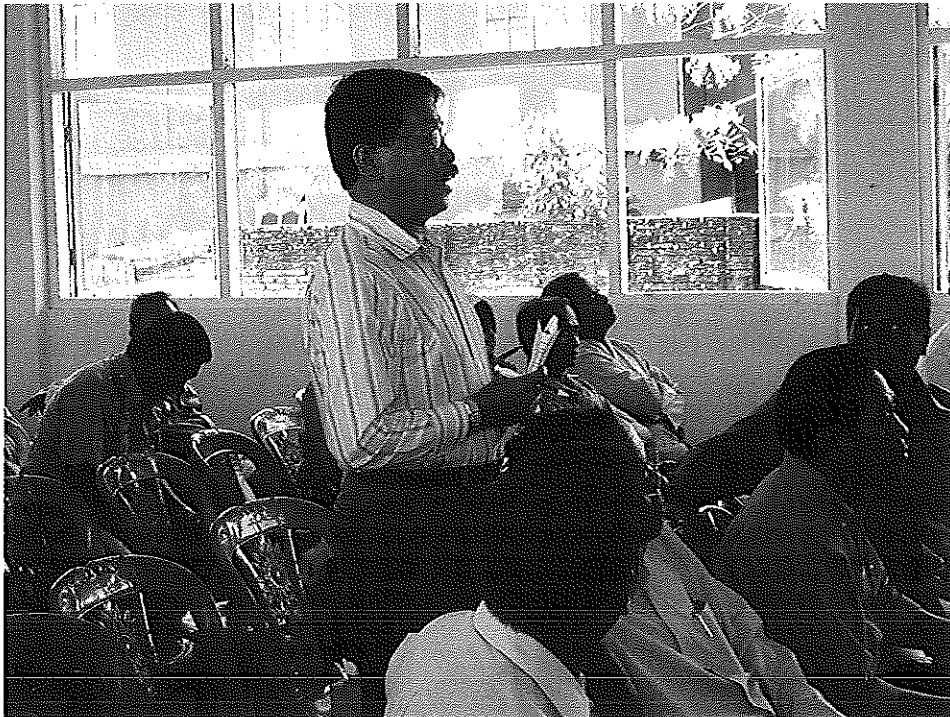






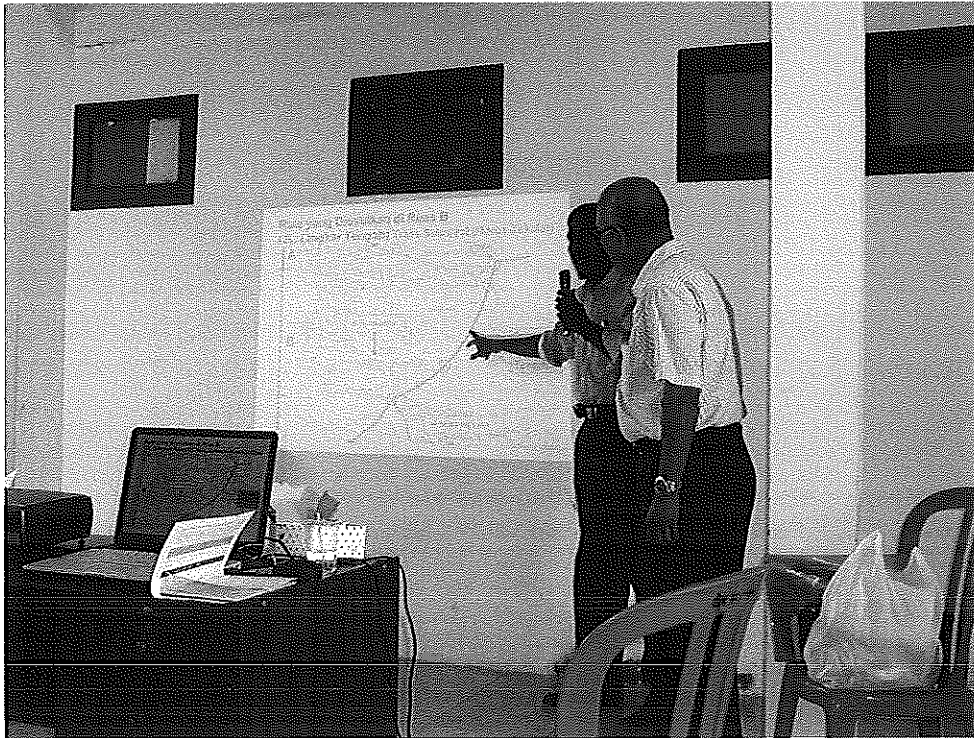
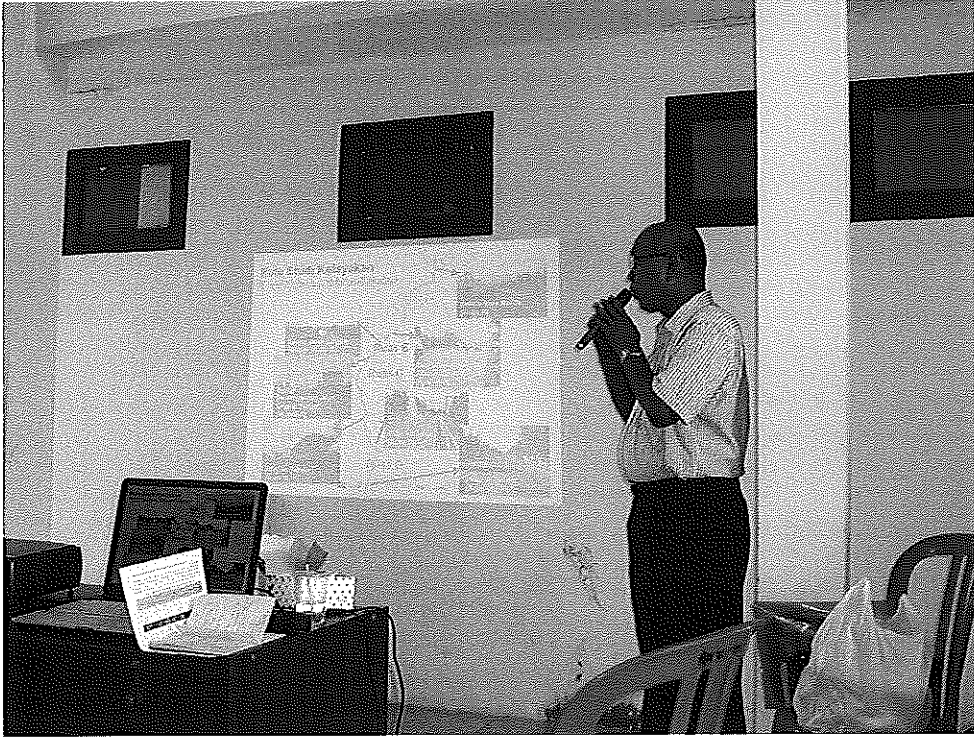




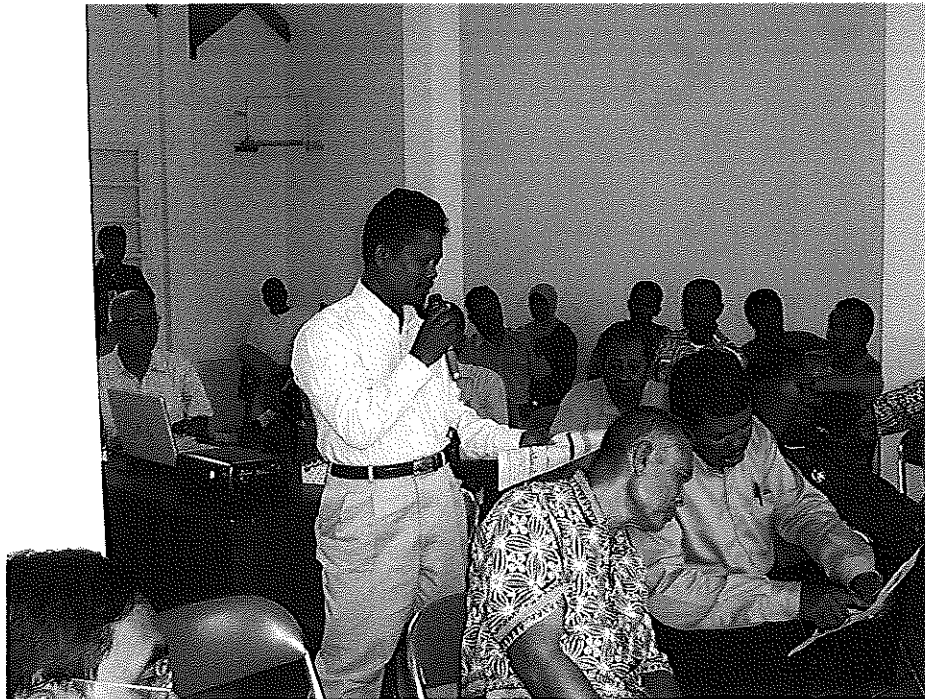


Pertemuan Konsultasi Publik Rappocini





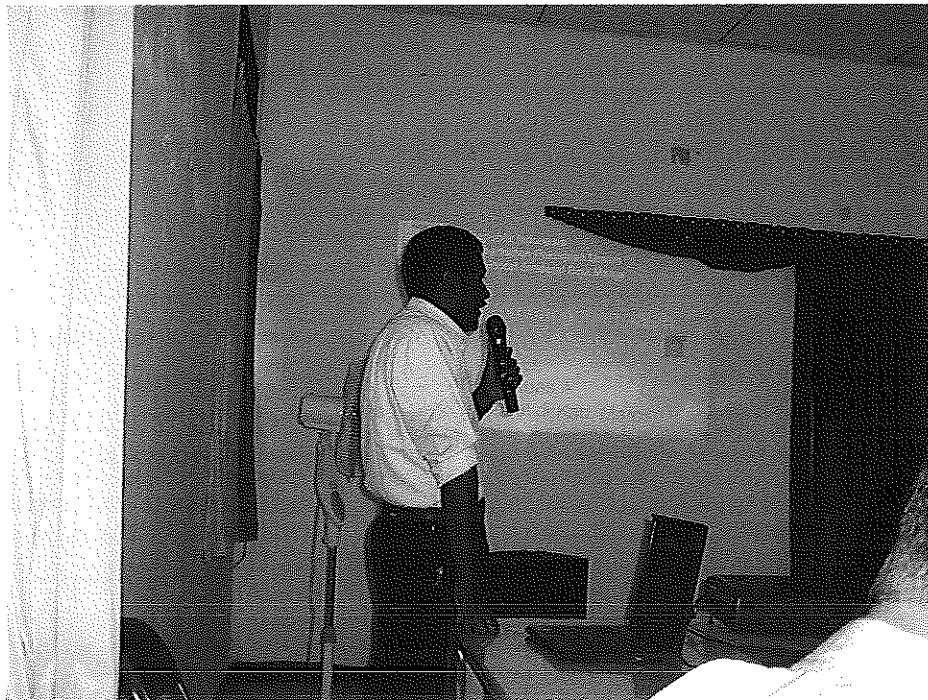
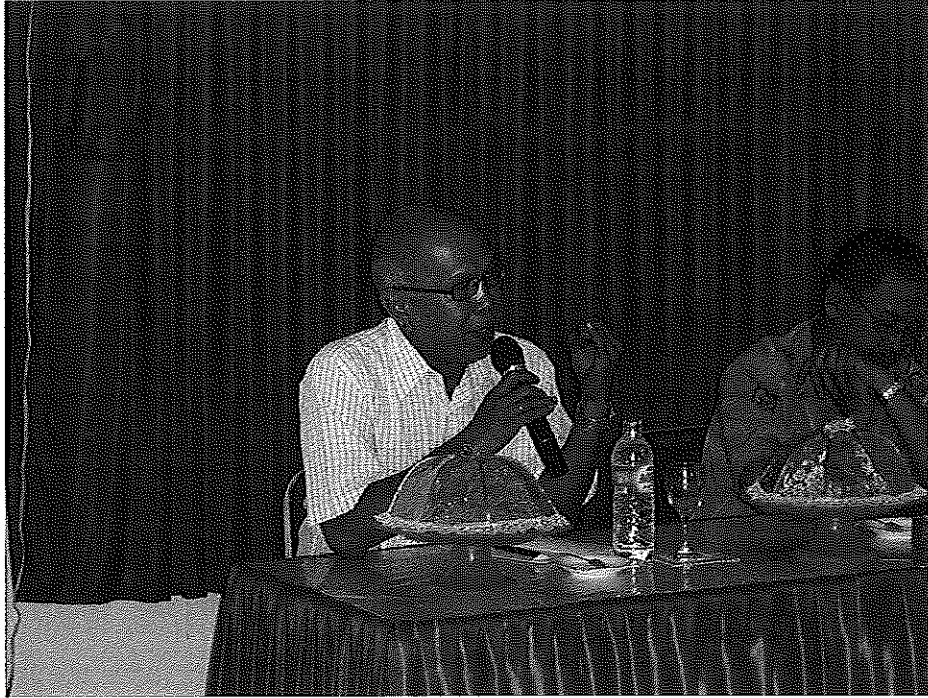


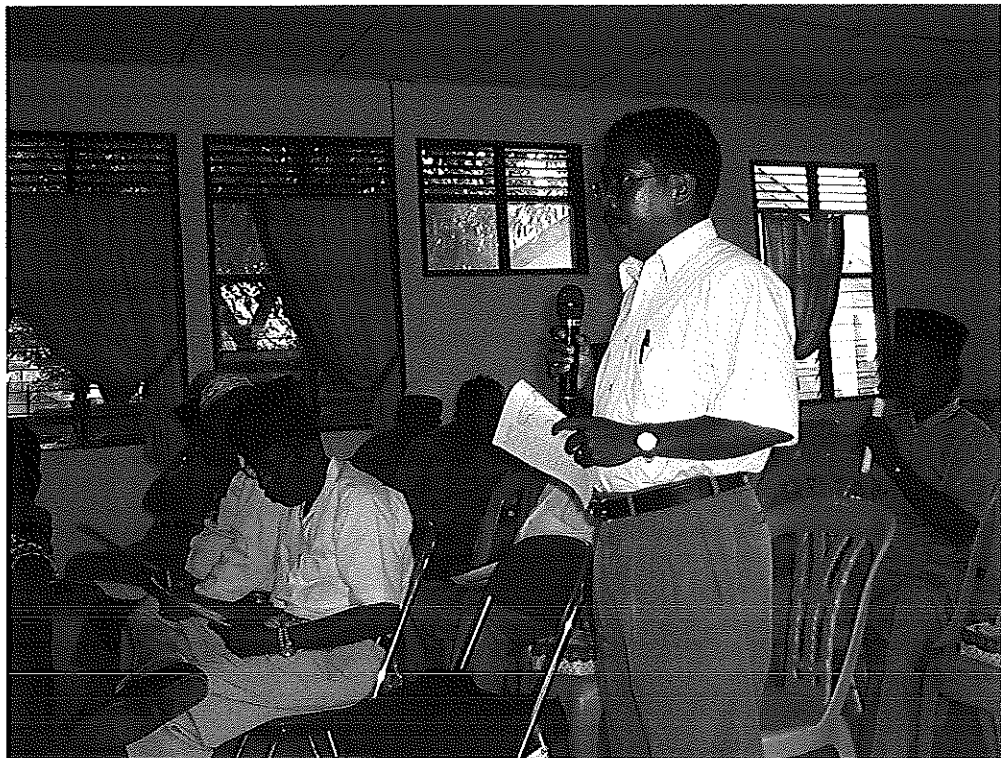


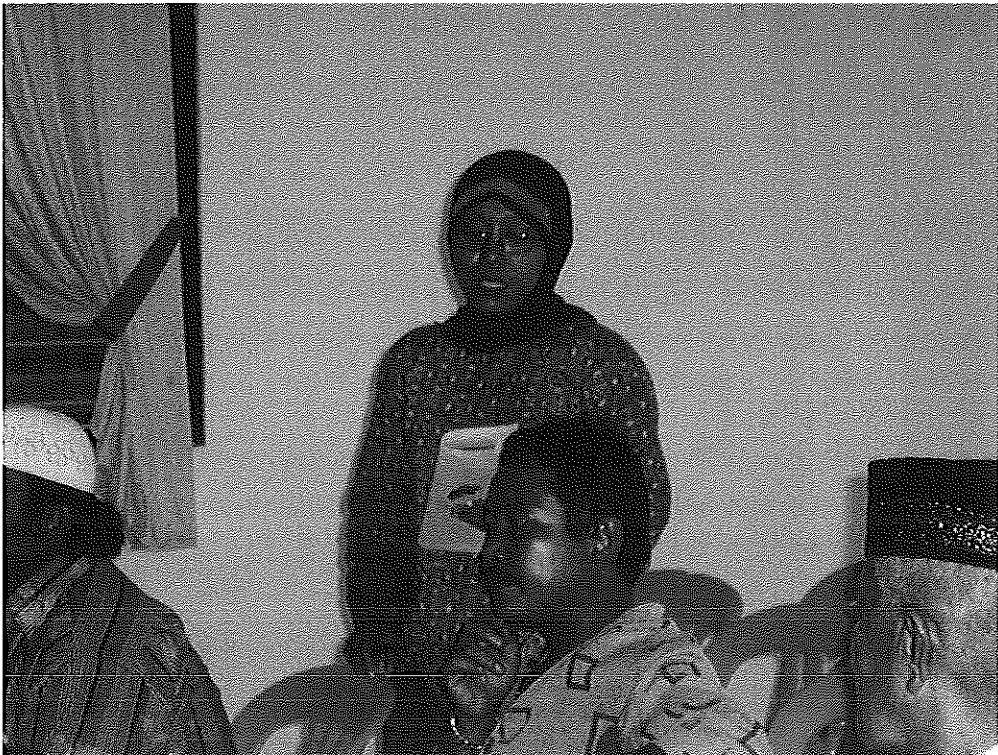
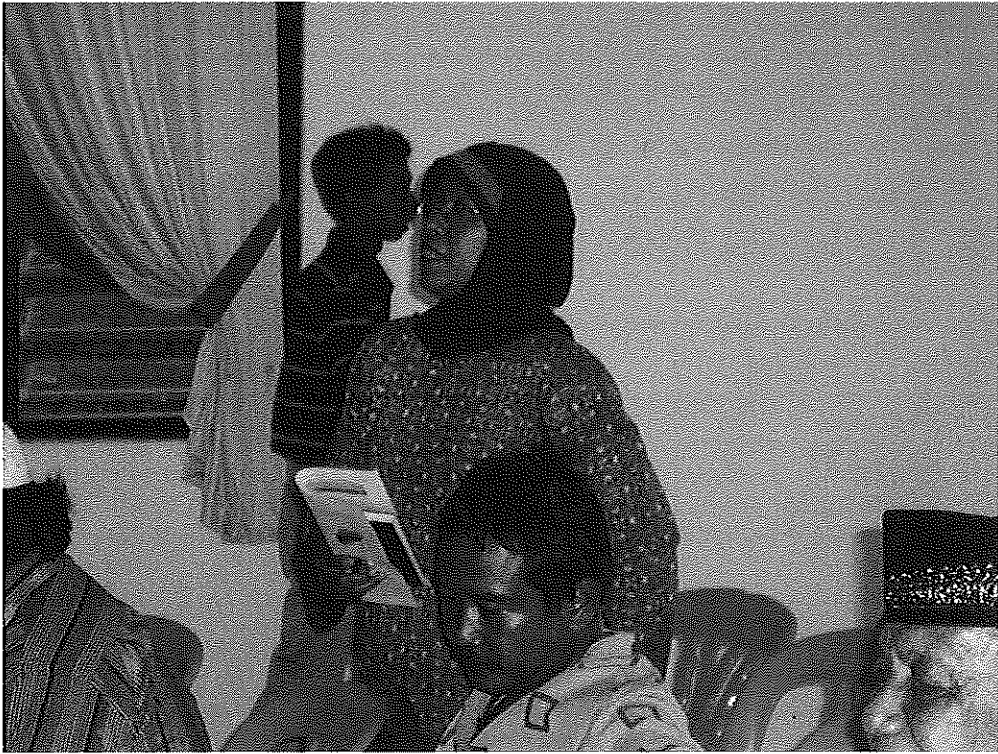


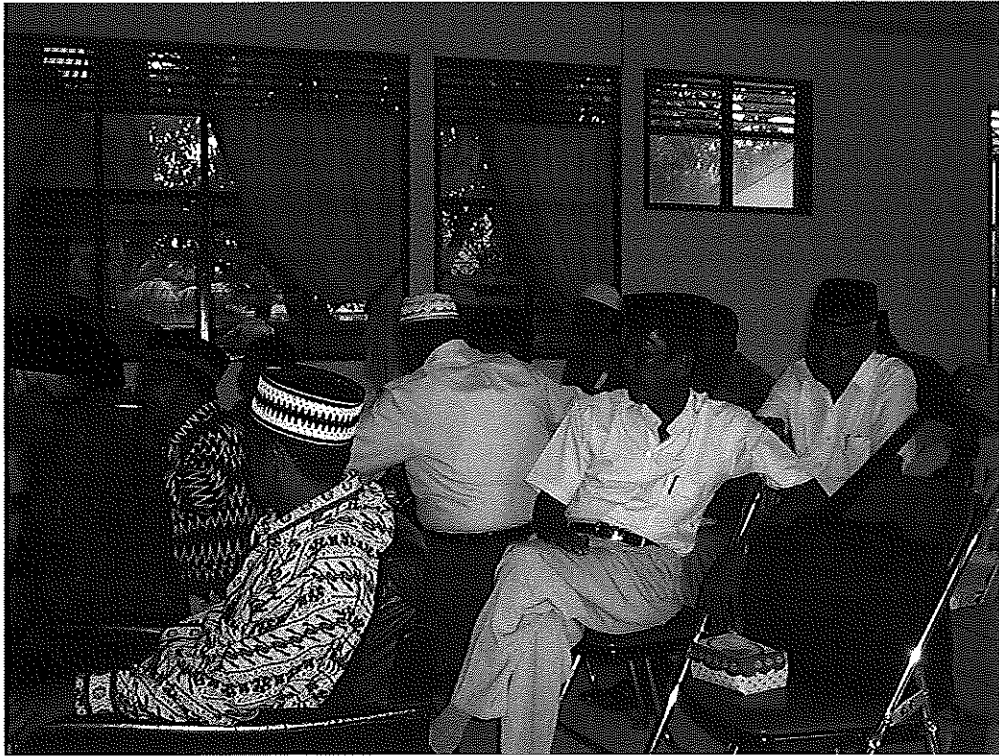
Pertemuan Konsultasi Publik Mandai













Pertemuan Konsultasi Publik (2) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Senin, 8 May 2007	
Tempat:	Ruang Rapat BAPEDALDA Provinsi Sulsel	
Peserta:	51 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	1 (Directorate General of Bina Marga)
	Pemerintah Provinsi;	15 orang (AMDAL technical team)
	Pemerintah Kabupaten/kota	20 orang
	Perwakilan masyarakat	8 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	3 orang (JICA) 4 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Moderator	Ketua tim Teknis AMDAL (Prof. DR. Ir Muslimin Mustafa)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penjelasan detail tentang rencana saluran drainase 2. Pemerintah Kabupaten membutuhkan informasi tentang letak rencana jalan ayng tepat sehingga dapat mempersiapkan pemngadaan tanah 3. Diharapkan melakukan kordiansi erat dengan BPN: Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait lainnya 4. Perlu dijelaskan bagaimana penanganan dengan irigasi di Takalar ayng etrkena dampak proyek 5. Perlu dipertimbangkan juga mengenai S. Jeneberang 		

Jawaban Atas Tanggapan/Masukan/Saran Terhadap Dokumen Kerangka
Acuan ANDAL Rencana Pembangunan Jalan Trans-Sulawesi
Mamminasata Ruas Maros - Takalar Propinsi Sulawesi Selatan

Oleh

Komisi Penilai Amdal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Tanggal 8 Mei 2007

NO	HALAMAN	TANGGAPAN/PERTANYAAN/SARAN PERBAIKAN	JAWABAN/PERBAIKAN	KET
	KA ANDAL			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak administrasi proyek jalan ini di uraikan berulang (lihat hal I – 3 dan II – 1). Harap diperbaiki. 2. Pembangunan RTH dimasukkan sebagai salah satu kegiatan prioritas pembangunan jalan ini. 3. Saluran Primer pada Ruas Makassar – Takalar perlu ditelaah secara cermat dan diperhitungkan dampaknya baik dampak pembangunan jalan terhadap saluran primer maupun keberadaan Saluran primer terhadap pembangunan jalan. Saluran primer sekarang digunakan sebagai sarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperbaiki - RTH telah menjadi kegiatan prioritas dalam kegiatan ini. Perwujudannya berupa jalur hijau selebar 3 hingga 10 meter pada bagian tengah jalan yang juga berfungsi sebagai pembatas/pemisah jalur, sehingga akan terbentuk RTH seluas minimal 17,4 ha. - Penelaahan tentang saluran primer akan dibahas lebih lanjut dalam dokumen 	

	<p>penyediaan air baku dan air bersih serta pengairan lahan pertanian setempat.</p> <p>4. Gambar yang disertakan supaya dibuat berwarna sehingga mudah membacanya seperti peta tata guna lahan, peta geologi dll</p> <p>5. Pada Rona awal geologi (Hal II-31), seharusnya pada sub bahasan Geologi yang dibahas adalah parameter geologi apa yang akan diteliti.</p> <p>6. Skala Peta untuk Peta Geologi jangan menggunakan peta 1 : 1.000.000, Gunakan Peta dengan skala yang besar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasi.</p> <p>7. Jelaskan dalam Dokumen KA lokasi pengambilan Quarrynya dan perlu dicermati kemungkinan dampak yang akan timbul atau kemungkinan dilaksanakan oleh Pihak Kedua (Berikan penjelasan).</p> <p>8. Beberapa halaman tidak lengkap misalnya II – 23 dan II – 1. Harap diperbaiki.</p> <p>9. Perlu ada Inventarisasi jenis penggunaan lahan yang dilalui proyek ini, terutama yang potensial terkena dampak.</p>	<p>ANDAL. Selain itu, Dinas Prasarana Wilayah hanya bertanggung jawab terhadap drainase jalan, selanjutnya untuk saluran primer dengan skala lebih besar merupakan tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>- Akan dijadikan masukan/perbaikan untuk presentasi selanjutnya.</p> <p>- Pada rona awal geologi tidak membahas parameter geologi</p> <p>- Sudah diperbaiki</p> <p>- Telah diberikan penjelasan</p>	
--	--	--	--

	<p>10. Data Rona Lingkungan Hidup Awal sebaiknya diprediksi berdasarkan tahapan Kegiatan, karena konstruksi baru dimulai tahun 2010 – 2011</p> <p>11. Sebaiknya konsisten dalam penggunaan satuan-satuan parameter kualitas air (table 3.4 dan table 3.6). Harap diperbaiki.</p> <p>12. Mengapa Aspek Biota Perairan tidak diamati padahal melewati beberapa sungai. Berikan penjelasan.</p> <p>13. Aspek Biologi tidak dalam rencana studi di Bab II padahal ada ahli biologinya. Harap disinkronkan dengan tim ahlinya .</p> <p>14. Mengapa tidak ada ahli Kualitas Air padahal ada dalam rencana Analisis di Bab III. Berikan penjelasan.</p> <p>15. Analisis Banjir Perlu diperkuat, karena pembangunan jalan potensial menyebabkan banjir.</p> <p>16. Dalam Pembebasan lahan dan penetapan besarnya ganti rugi apa dibentuk Panitia 9 (sembilan) yang melibatkan instansi teknis. Berikan penjelasan.</p> <p>17. Tetap mengacu pada Kepres</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperbaiki - Jenis penggunaan lahan pada lokasi yang potensial terkena dampak telah diinventarisasi dan dapat dilihat pada peta tata guna lahan. - Tahapan studi AMDAL ini merupakan bagian dari studi kelayakan kegiatan sehingga menjadi salah satu parameter dilaksanakannya proyek. - Sudah diperbaiki - Aspek biota perairan tetap akan diamati. Saran akan diperhatikan. - Telah disinkronkan - Tenaga ahli lingkungan yang akan membahas mengenai kualitas 	
--	---	---	--

		<p>No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan dan Kepentingan Umum</p> <p>18. Saran : Dalam pembebasan Lahan, Status tanah/bukti kepemilikan tanah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - yang sudah bersertifikat (HM/HP/HGB) - yang belum bersertifikat : <ul style="list-style-type: none"> a. tanah milik adat (C Rincik) b. tanah Negara dikuasai (PBB atau tanah garapan) <p>status tanah tersebut diatas dapat menjadi dasar ke Panitia 9 dalam menentukan kesepakatan tentang besarnya ganti rugi.</p> <p>19. Penggunaan lahan diwilayah proyek supaya di perinci per Kabupaten/Kota dengan Metode Penggunaan Lahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk Tanah Pemukiman <ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman penduduk - Jasa - Industri - Perdagangan - Tanah kosong b. Untuk tanah pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Sawah beririgasi teknis - Sawah non Irigasi - Kebun campuran 	<p>air.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akan dibahas lebih lanjut dalam dokumen ANDAL - Pembebasan lahan dan penetapan besarnya ganti rugi akan diserahkan kepada instansi terkait berdasarkan peraturan yang ada yaitu Kepres No. 36/2005 - Saran akan dipertimbangkan - Saran akan dipertimbangkan - Penyajian data tersebut akan dibahas dalam dokumen ANDAL 	
--	--	--	---	--

		<p>22. Disini juga tidak disinggung accident kalau jalan ini sudah berfungsi harus ada analisis tempat yang rawan kecelakaan dan harus dianalisis resiko kesehatan yang ditimbulkan.</p> <p>23. Kuesioner Kesmas yang anda ajukan jauh dari standar. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut kami sarankan menemui Bapak Anwar Daud, SKM, M.Kes. Harap diperbaiki.</p> <p>24. Di dalam kuesioner tidak ada pertanyaan tentang Perilaku. Ini erat kaitannya dengan adanya fasilitas jalan, terutama jangkauan dalam mencari pengobatan secara modern. (puskesmas dan Rumah sakit). Kuesioner harap dicermati dan disempurnakan kembali.</p> <p>25. Teknik untuk mengetahui perkembangan vektor penyakit sebelum dan setelah jalan sudah dioperasikan. Harap diperbaiki.</p>	<p>Kesehatan Lingkungan menetapkan bahwa ADKL dilaksanakan dalam lingkup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dari suatu usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Pendekatan ADKL direkomendasikan oleh WHO dan Depkes RI sehingga pendekatan itulah yang digunakan bukan model ERA.</p> <p>- Kecelakaan lalu lintas tidak secara langsung berkaitan dengan resiko kesehatan. Pendekatan pemecahan masalah kecelakaan lalu lintas melalui 3 pendekatan, yaitu : (a). Traffic law education; (b). Traffic law enforcement; dan (c). Traffic facilities</p>	
--	--	--	--	--

		<p>26. Perlu diadakan penetapan tapal batas jalan Trans Sulawesi untuk memperjelas atau sebagai bahan pertimbangan pemberian IMB.</p> <p>27. Dalam KA-ANDAL Belum dapat antisipasi dan lokasi sarana dan prasarana social. (saluran listrik, air minum, telekomunikasi dan lain-lain). Untuk Sarana Utilitas jadikan sebagai salah satu isu pokok yang akan dikaji.</p> <p>28. Peta penggunaan lahan dan peta- peta rupa bumi tidak sesuai dengan skala dan tidak inuntukmative sehingga tidak dapat mewakili dari paHari/tanggalma peta. Harap diperbaiki.</p> <p>29. Belum ada data pemeriksaan kualitas udara dan kebisingan sebagai data awal. Harap dilengkapi.</p> <p>30. Mengapa tidak dibahas di KA kesimpulan (matrix ringkasan tanggapan masyarakat pada kegiatan konsultasi publik)</p> <p>31. Data Kesmas tidak ada dalam Dokumen. Harap dilengkapi.</p> <p>32. Pada Tabel 2.12 Pelingkupan dampak, komponen lingkungan terhadap drainase dan banjir. Hanya pada tahap</p>	<p>improvement.</p> <p>Menurut kami tidak perlu mengada-ada untuk dikaitkan dengan resiko kesehatan.</p> <p>- Kuesioner standar untuk mengkaji inuntukmasi kesehatan masyarakat menurut kami sudah cukup komprehensif, karena substansi instrumen mencakup masalah kesakitan, kematian, kelahiran dan inuntukmasi tentang cakupan sarana air bersih, jamban keluarga, pengelolaan sampah dan aksesibilitas ke sarana kesehatan (termasuk : jarak dan cara menjangkau sarana kesehatan).</p> <p>- Telah dikemukakan bahwa untuk mengetahui perkembangan vektor penyakit sebelum dan</p>	
--	--	--	--	--

		<p>konstruksi. Pada tahap operasional perlu dikaji dampak-dampak seperti polusi udara, banjir, kebisingan dan getaran</p> <p>33. Aspek kerusakan badan jalan akibat pengangkutan material tidak diperhitungkan, sebaiknya dimasukkan sebagai salah satu dampak pada saat konstruksi.</p> <p>34. hal II – 141 dan Tabel 2.2 di hal II -5 datanya masuk ke bab II – 2.2 Rona Lingkungan Hidup Awal.Harap diperbaiki.</p> <p>35. Perlu penjelasan teknis lebih lanjut mengenai dasar penetapan titik-titik sampling.</p>	<p>sesudah tahap operasional, dilakukan sesuai entamologis yang hanya dapat dilakukan oleh seorang Vector Control Spesialist dan bukan oleh seorang environmental health practitioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan mengenai hal tersebut sudah ada. - Hal tersebut akan dibahas dalam dokumen ANDAL - Peta rupa bumi yang terdapat dalam KA-ANDAL sudah sesuai berdasarkan skala dan legenda sudah cukup jelas. - Data dimaksud akan disajikan dalam dokumen ANDAL. - Data dimaksud akan disajikan dalam dokumen ANDAL 	
--	--	---	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Data dimaksud akan disajikan dalam dokumen ANDAL - Saran akan dipertimbangkan - Hal tersebut akan dibahas dalam dokumen ANDAL. - Telah diperbaiki - Penetapan titik sampling berdasarkan survei awal dan mewakili kondisi lokasi rencana pembangunan ruas jalan Maros-Takalar. 	
		<p>Mencermati tanggapan masyarakat pada kegiatan konsultasi publik pada umumnya pemerintah kecamatan dan masyarakat mendukung pembangunan ruas jalan Maros – Takalar (58 Km) Jalan Trans Sulawesi mamminasata, harus memperhatikan saran-saran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saran akan diperhatikan 	

		<p>sebagai berikut :</p> <p>1. Dampak besar dan penting yang berkaitan dengan sosekbud yang perlu diperbaiki adalah :</p> <p>Keresahan masyarakat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembebasan lahan (mengacu kemana) - Kehilangan mata pencaharian - Banjir - Kebisingan dan - Kemacetan lalu lintas 		
	ii	<p>DAFTAR ISI</p> <p>BAB II RUANG LINGKUP STUDI</p> <p>Pada nomor 4 tertulis Uraian Singkat tentang Kegiatan di sekitar rencana lokasi proyek halaman II – 18 seharusnya tertulis halaman II – 24. Harap diperbaiki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengapa pada Sub Bab II 2.2 Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal tidak ada peta tata guna lahan (pemukiman/perumahan, sawah, kebun/lading; berapa banyak dan berapa luasannya. Harap dilengkapi. - Pada Sub Bab II – 33 harus dilengkapi dengan data awal tentang berapa banyak pemukiman dan berapa luas sawah/kebun yang akan 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah diperbaiki - Telah dilengkapi - Telah dilengkapi 	

		dibebaskan.		
	I – 1	<p>Pendahuluan</p> <p>Pada pendahuluan perlu dijelaskan kenapa pembangunan Ruas jalan Maros-Takalar perlu dilakukan.</p> <p>Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 harus ditulis secara jelas tentang apa</p>	- Telah diperbaiki	
	I – 3	<p>Pada point 1.3 Peraturan Perundang – undangan terkait</p> <p>Saran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya peraturan Undang-undang disusun berurutan sesuai urutan Tahun Penetapannya - Ditambahkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah - Ditambahkan Undang – undang No. 38 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan - Ditambahkan PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan - Ditambahkan Perda Tata Ruang wilayah dari masing-masing Kabupaten/Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saran akan diperhatikan - Tata ruang yang menjadi pedoman adalah Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata 	
	I – 6	<p>Peraturan Pemerintah</p> <p>Tertulis Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang</p>	- Telah diperbaiki	

		Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985). Seharusnya tertulis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 jadi bukan Tahun 1985. Agar dikoreksi dan diperbaiki		
	I – 7	Peraturan / Keputusan Menteri Pada Nomor urut 1 seharusnya dipindahkan / disatukan kedalam kelompok Peraturan Menteri pada halaman I – 8. Agar diperbaiki	- Telah diperbaiki	
	I - 8	Tambahkan pula keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	- Telah ditambahkan	
	Bab II	Ruang Lingkup Studi Ad 2.1. b. Alternatif yang dikaji di dalam ANDAL alternative ini harus memenuhi syarat-syarat seperti : - Terintegrasi dengan pertimbangan Lingkungan - Terintegrasi dengan Prinsip - prinsip pencegahan pencemaran - Telah disetujui oleh Pemangku kepentingan. Syarat-syarat ini dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan	- Saran akan diperhatikan	

		<p>seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dasar pemikiran yang digambarkan dalam mempertimbangkan kajian alternatif ; misal lokasi RU yang melewati pemukiman penduduk, sawah, memotong jalan, jembatan dan lain-lain 2. Apa prosedur yang digunakan dalam melakukan pemilihan alternative 3. Sebaiknya ada penjelasan bahwa alternative yang dipilih akan dikaji lebih lanjut dalam kajian ANDAL 4. Kemukakan pustaka yang digunakan dalam pemilihan alternatif 		
	II – 5	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pembangunan jalan lingkaran tengah khususnya ruas B dan C, sedapat mungkin/diusahakan menghindari pemukiman padat penduduk. - Ruas A (pelebaran Jl. Perintis) <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada pembebasan lahan, yang dilakukan adalah kompensasi Rolling bangunan untuk penggantian lahan warga yang terkena pelebaran, Pemkot Makassar memberikan kompensasi terhadap batas bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruas B dan C adalah sebagian besar jalan baru dengan menghindari masalah sosial berupa pemukiman padat penduduk. - Saran akan diperhatikan. 	

		<p>dari As jalan dari 75 meter menjadi 50 meter yang dapat dibangun</p> <p>b. lahan untuk pelebaran di lapangan masih cukup tersedia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruas B (jalan lingkaran tengah) <ul style="list-style-type: none"> a. kurang lebih 60% lahan telah dibebaskan b. ruas ini telah dipatok di lapangan dan lokasi jalan ini tidak akan diberi izin mendirikan bangunan (IMB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Saran akan diperhatikan. 	
	II – 10	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar 2 – 6, 2 – 8, 2 – 10, 2 – 23, 3 – 1, 3 – 2, dan 3 – 3. Supaya diperbesar dan diberi warna supaya mudah terbaca dan jelas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saran akan diperhatikan 	
	II – 29	<ul style="list-style-type: none"> - Rona lingkungan hidup awal, disini tidak ada disinggung mengenai fasilitas kesehatan sehingga rona lingkungan hidup yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat tidak nampak seperti berapa jumlah dan jenis penyakit yang ada di daerah tersebut sehingga kajiannya bias lebih mendalam. - Prakiraan Dampak penting terhadap Kesehatan Masyarakat, tidak dijelaskan penyakit-penyakit apa yang potensial dapat timbul atau 	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilengkapi dengan kajian pola penyakit/kesakitan di setiap lokasi proyek, kalau memungkinkan akan dilampirkan. Analisis akan dilakukan memenuhi saran-saran tim teknis dengan mengacu pada langkah-langkah teknis operasional ADKL. 	

		<p>mewabah bila jalan ini beropersasi bagaimana mekanismenya bisa terjadi. Oleh karena itu disarankan menggunakan Model EPHC (Enviromental Public Helth Continuum) untuk merumuskan atau mengkaji dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kegiatan ini,. Kami sarankan menggunakan bukunya Ricard Albertin, 2006 untuk mengkaji hal tersebut.</p>		
	II – 39	Tabel 2.11 lengkapi nama ilmiah	-	Telah dilengkapi
	II – 41	<p>Proses Pelingkupan Pada Tabel 2.12 (hal II – 42) terkena dampak potensial pada tahap konstruksi fase 3 (pembersihan/persiapan lokasi). Namun demikian, pada bagan alir tahap konstruksi (gambar 2.19 hal II – 44) kedua hal tersebut dihilangkan. Mengapa hal ini terjadi?</p> <p>Saran : Sebaiknya hal ini dimunculkan dengan membuat satu kotak pada kolom dampak primer dibawah kotak ketiga yang mendapat pengaruh dari kotak “pembersih dst.” Pada kolom dampak sekunder ditambahkan kotak dibawah kotak kedua, yang kemudian diisi dengan “Estetika/Kenyamanan”</p>	-	<p>Kegiatan pembersihan/persiapan lokasi masih tersaji pada gambar 2.19 dan <i>tidak dihilangkan</i>. Kegiatan pembersihan yang dimaksud adalah persiapan dalam rangka kegiatan konstruksi sehingga tidak bisa dihubungkan dengan estetika/kenyamanan.</p>

	II – 42	<p>Matrix pelingkupan dampak Kolom komponen lingkungan? Diurut mana yang termasuk dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Fisik-Kimia, 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosial Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat. 	<p>- Saran akan dipertimbangkan</p>	
	II – 46	<p>2. Tahap Prakonstruksi</p> <p>Pada huruf b dikatakan pembebasan tanah untuk kepentingan lokasi pembangunan ruas jalan kemungkinan timbul keresahan penduduk di lokasi tersebut.</p> <p>Cantumkan ada berapa ha dan Kepala Keluarga (KK) yang akan dibebaskan tanahnya.</p> <p>Butir 1.b Pembebasan tanah perlu di terangkan berapa luas yang akan dibebaskan.</p>	<p>- Data luasan lahan dan bangunan yang akan dibebaskan telah disajikan pada tabel 2.2. Sedangkan penjelasan lebih mendetail akan dibahas pada dokumen ANDAL.</p>	
	II – 49	<p>Point 5 Meningkatnya prevalensi penyakit tertentu sebaiknya harus jelas peningkatan ISPA dan penyakit apa yang dimaksudkan dapat berkembang.</p>	<p>- Point 5 akan dipertegas dengan menyebutkan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas dan atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Penyakit ini akan meningkat oleh adanya bahan pencemar di udara.</p>	

			<p>Selain ISPA, penyakit lain juga diperkirakan akan meningkat antara lain adalah hipertensi dan penyakit pada sistem kardio vaskuler. Penyakit lain yang ditengarai dapat meningkat adalah insomnia (karena kebisingan) atau bahkan dapat menyebabkan gangguan pendengaran.</p>	
	II – 50	<p>Gambar 2.21, dampak potensial pada point 11 mengenai penyakit menular (HIV/AIDS), apa hubungannya dengan pembangunan Ruas Jalan Maros – Takalar. Berikan penjelasan.</p>	<p>- HIV/AIDS tidak memberikan dampak langsung terhadap pembangunan jalan. Sebagaimana diketahui penyakit HIV/AIDS adalah tergolong penyakit menular seksual (PMS) yang penularannya melalui hubungan seksual. Dalam pembangunan jalan biasanya ada base camp sebagai</p>	

			<p>tempat istirahat para tenaga kerja. Adanya pembangunan jalan akan memperlancar mobilitas antar daerah termasuk PSK yang mencari mangsa di base camp. PSK adalah reservoir dan penjamur bagi penyakit HIV/AIDS, sehingga dengan banyak PSK yang berdatangan maka resiko penularan HIV/AIDS menjadi lebih tinggi. Pada hakekatnya tidak hanya penyakit HIV/AIDS tetapi penyakit yang tergolong PMS pada umumnya dapat terjadi.</p>	
	II – 51	<p>2.4.2. Batas Ekologis</p> <p>Batas ekologis mungkin tidak harus DAS, seperti DAS Jeneberang, tetapi mungkin cukup pada areal topografi landai/datar yang berpotensi mendapat genangan di musim hujan sebagai akibat pembangunan jalan yang berpotensi meningkatkan</p>	<p>- Saran yang diberikan akan dipertimbangkan.</p>	

		permukaan air dimusim hujan karena drainase/gorong-gorong yang tidak cukup untuk pengaturan. Batas ekologis ini dapat ditetapkan dari peta topografi melalui delineasi semua areal yang kemiringan lerengnya dibawah 8% atau 15%. Silahkan analisis kemungkinannya.		
	II – 51	Batas ekologi dan batas studi, Batas ekologis memakai ekosistem DAS adalah komponen-komponen lingkungan yang berpotensi karena dampak di DAS tidak jelas, Debit aliran dan penggunaan jalan bagaimana hubungannya. Harap diperbaiki.	-	Telah dilakukan perbaikan. Pembahasan lebih jelas akan dibahas dalam dokumen ANDAL.
	Bab III	Metode Studi (Sesuaikan kembali dengan Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL).	-	Metode studi telah disesuaikan.
	III – 2	Sumber tabel 3.1 Mohon dicermati apakah betul Metode Analisis Data Komponen Iklim ada pada SK Gubernur No. 14 Tahun 2003.	-	Telah dilakukan perbaikan.
	III – 22	Mengapa tiba-tiba ada kalimat (paling bawah lokasi pengambilan sample komponen fisik kimia, pada hal kita poin bahasan adalah “penggunaan lahan”. Harap diperbaiki.	-	Telah dilakukan penyesuaian.
	III – 25	Hilangkan factor koreksi 0,7 karena itu untuk penentuan volume	-	Telah dilakukan perbaikan.

<p>III – 26 s/d III-28</p>	<p>b. Metode Pengambilan Sampel Pada metode direncanakan akan mengambil sample pada 16 titik pengamatan, yang mempunyai jarak penyebaran yang seimbang pada setiap kelompok ruas jalan. Mengapa pada gambar 3.2 lokasi sampling hanya ada empat Saran : Lokasi sampling hendaknya digambar berdasarkan lokasi yang direncanakan, yakni mewakili setiap penggunaan lahan pada setiap kelompok ruas jalan.</p>	<p>- Lokasi pengambilan sampel pada Gambar 3.2 sudah benar karena terdapat empat lokasi stasiun pengamatan dan setiap lokasi akan dilakukan pengamatan diempat titik yang mewakili penggunaan lahan sawah, kebun campuran, pekarangan dan semak belukar. Lokasi tersebut sudah mewakili kelompok ruas jalan yang dimaksud.</p>	
<p>III – 29</p>	<p>Komponen sosekbud sebaiknya dicantumkan dalam dokumen yaitu jenis lapangan kerja masyarakat yang akan terkena dampak terutama yang dibebaskan lahan atau bangunannya.</p>	<p>- Jenis lapangan kerja masyarakat di lokasi proyek akan didata dan dibahas dalam dokumen ANDAL.</p>	
<p>III – 33 – 35</p>	<p>- Metode Studi utamanya prakiraan dampak kesehatan masyarakat rencananya lebih banyak menggunakan data sekunder. Jadi disarankan menggunakan data primer</p>	<p>- Selain data sekunder, juga digunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara</p>	<p>-</p>

		<p>karena kalau hanya menggunakan data sekunder nanti analisisnya tidak tajam dan itupun jumlah sampelnya harus memenuhi kriteria metodologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap operasional dampak penting akan timbul tidak dikaji secara mendalam terutama jenis-jenis penyakit apa yang mungkin bisa muncul akibat adanya kegiatan ini. Untuk membahas hal ini perlu menggunakan Model BIDEHRS, 2006. - Referensi yang sudah kadaluarsa dikeluarkan sehingga penyusunan kerangka acuan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang. - Masalah sosial yang terkait dengan Kes-Mas belum ada dimasukkan dianalisis. Harap dimasukkan. 	<p>langsung dengan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saran akan diperhatikan. - Penyajian data lebih mendetail akan dibahas dalam dokumen ANDAL. 	
	III – 39	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan masyarakat diperlukan data mengenai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat disekitar peroyek. - Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat disekitar tapak proyek tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data mengenai jenis penyakit dan data kesehatan masyarakat lainnya akan disajikan dalam dokumen ANDAL. 	

	III – 37	Sesuai dengan peraturan Menteri LH Nomor 8 Tahun 2006, tidak ada lagi kata dampak besar tapi Metode Perkiraan Dampak Penting. Harap disesuaikan.	- Telah disesuaikan	
	III – 43	Sesuai dengan Permen LH No 8 Tahun 2006 tidak ada point Rumusan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Harap disesuaikan.	- Telah disesuaikan	
	III - 112	Untuk Perhitungan data/Analisis Penentuan karakteristik arus lalu lintas disarankan menggunakan semua kendaraan berdasarkan type/jenis kendaraan bermotor yang lewat pada Pos yang sudah ditentukan misalnya : sepeda motor, minibus pick-up, bus sedang, truk ringan, truk sedang, truk berat/besar dan sedan/jeep dan lain type kendaraan yang lewat pada waktu penghitungan.	- Saran akan dipertimbangkan	
	IV – 1	Halaman IV – 1 tidak ada.	- Akan diperhatikan	
	IV - 4, IV – 7	Tidak cocok rencana waktu pada halaman IV – 4 khususnya butir 5 dan 6 dengan kegiatan pada table IV – 2 Butir 5 dan 6 (perbaiki Kerangka Acuan) Pada table IV – 2 tidak ada : - Penyerahan kerangka acuan - Diskusi kerangka acuan	- Telah diperbaiki	